



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2014, perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011](#) tentang Komisi Kepolisian Nasional;
3. [Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
4. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
6. [Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015](#) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.



Pasal 1

Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan dari pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang belum diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.
- dinyatakan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan yang berlaku setelah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja baru, mengacu pada Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini, maka Kelas Jabatan akan disesuaikan dengan Kelas Jabatan sesuai Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-401/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2013, sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.



Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/*Grade* Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1609

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,



Drs. Subroto, M.M.



**KELAS JABATAN
 DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.A)	17	Sekretaris Kementerian Koordinator
			Deputi
2.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.B)	16	Staf Ahli
			Staf Khusus
3.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Biro
			Asisten Deputi
			Inspektur
4.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
			Kepala Bidang
		11	Kepala Bagian Perpustakaan
5.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11	Auditor Madya
6.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
7.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	9	Dokter
			Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
			Auditor Muda
			Analisis Kebijakan Muda
8.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	8	Kepala Subbagian Administrasi Pustaka



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	8	Kepala Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka Kepala Subbagian Pelayanan Pustaka Kepala Subbagian Persuratan Kepala Subbagian Penggandaan Kepala Subbagian Pengamanan
9.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8	Analis Kebijakan Pertama Bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Komunikasi dan Informasi Auditor Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama
10.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Arsiparis Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
11.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Analisis Politik Dalam Negeri Analisis Politik Luar Negeri Analisis Hukum Analisis Pertahanan dan Keamanan Analisis Komunikasi dan Informasi Analisis Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Analisis Perencana Pelaksanaan Anggaran Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis Organisasi Analisis Tata Laksana Analisis Pengelola Barang Milik Negara Analisis Kegiatan Persandian Bendahara Pengeluaran Pelaksana Monitoring Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penata Kesekretariatan Penata Laporan Keuangan



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Pengelola Kepegawaian Penyiap Bahan Publikasi Hasil Persidangan Penyiap Bahan Produk Hukum Penyiap Bahan Konsultasi dan Bantuan Hukum Penelaah Hubungan Kelembagaan Penyusun Laporan Akuntabilitas Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusun Laporan Pengembangan Kinerja Organisasi Penyusun Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Penyusun Laporan Kerumahtanggaan Penyusun Penggajian Pegawai Penyusun Rencana Pelaksanaan Persidangan Penyusun Materi Persidangan



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Penyusun Rekaman dan Transkrip Persidangan
			Penyusun Bahan Risalah
			Penyusun Laporan Hasil Pengawasan
			Perencana
12.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana
			Perawat
			Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana
			Pustakawan Pelaksana
13.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Pengadministrasi Keuangan
			Penata Acara
			Pengolah Bahan Kegiatan Persandian
			Pengolah Data
			Verifikator
14.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Komandan Peleton Satuan Pengamanan
			Operator Komputer
			Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan
			Pengadministrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Pengadministrasi Tata Naskah Pengadministrasi Umum Pengawas Sarana dan Prasarana Petugas Protokol Petugas Pelayanan Persidangan Petugas Dokumentasi Teknisi
15.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	4	Komandan Regu Satuan Pengamanan Pengagenda Surat Pengemudi Penata Jamuan Acara Petugas Penggandaan Petugas Persandian
16.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka Penata Naskah dan Dokumen Petugas Pergudangan Pendistribusi Risalah



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Satuan Pengamanan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,



Drs. Subroto, M.M.



KELAS JABATAN
 DI SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN
 REPUBLIK INDONESIA

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Sekretariat
2.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
3.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Bendahara Pengeluaran
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Pengevaluasi Pengaduan Internal dan Eksternal
			Penyusun Bahan Pengambilalihan Pemeriksaan
			Penyusun Laporan
			Penyusun Laporan Pengaduan
			Penyusun Materi Koordinasi dengan K/L, Ormas, dan Perguruan Tinggi



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Penyusun Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Komisi Kejaksanaan Perencana
6.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana
7.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Verifikator Pengelola Rumah Tangga Pengelola Barang Milik Negara
8.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Petugas Protokol Operator Komputer Pengawas Sarana dan Prasarana
9	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,



Drs. Subroto, M.M.



KELAS JABATAN
 DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Sekretariat
2.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
3.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Bendahara Pengeluaran
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Penyusun Laporan Administrasi SKM
			Penyusun Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut
			Penyusun Laporan Hubungan Lembaga Pemerintah
			Penyusun Laporan Hubungan Media dan Masyarakat
			Perencana
6.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana



NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
7	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Pengadministrasi Keuangan
			Pengelola Barang Milik Negara
			Pengelola Rumah Tangga
			Pengolah Data dan Info SKM
			Verifikator
8	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan
			Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
			Pengadministrasi Umum
			Operator Komputer
9	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,



Drs. Subroto, M.M.

